

**WANPRESTASI PADA PENYEWAAN KENDARAAN BERMOTOR
RODA EMPAT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada CV. Pandawa Ban Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)



OLEH

JULI DELMAYANTI
10422025073

PROGRAM S1

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2009**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***Wanprestasi Pada Penyewaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada CV. Pandawa Ban di Pekanbaru)***. Adapun latar belakang penelitian ini dilakukan karena terdapat penyimpangan atau wanprestasi dari pihak penyewa kepada pihak yang memberikan sewa. Didalam perjanjian maupun pelaksanaannya pihak yang menyewakan merasa dirugikan.

Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan pada CV. Pandawa Ban di Pekanbaru, jalan Durian Labuhbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam, terhadap praktek pelaksanaan sewa menyewa tersebut.

Ada beberapa pokok permasalahan dalam skripsi ini diantaranya adalah bagaimana prosedur perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat pada CV. Pandawa Ban di Pekanbaru, bagaimana hak dan kewajiban serta penyelesaian kasus terhadap wanprestasi pada penyewaan kendaraan bermotor roda empat, bagaimana pandangan hukum Islam.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang penulis peroleh langsung dari responden, dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari pimpinan CV. Pandawa Ban di Pekanbaru melalui, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan tidak langsung, dalam hal tersebut diperoleh dari peraturan perundang undang (KUHPerdata), arsip dan literatur yang terkait erat dengan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa atau *ijarah* di CV. Pandawa Ban di Pekanbaru menggunakan sistim perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian sewa menyewa secara tertulis dilakukan apabila mobil yang disewa bisa menjadi milik penyewa dengan beberapa syarat seperti memberikan fotokopi KTP, KK, dan rekening listrik serta memberi uang sewa perharinya Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika perjanjian dibuat dengan tulisan maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau diperlukan suatu pemberitahuan untuk itu. Sedangkan perjanjian tidak tertulis (lisan) dilakukan apabila mobil yang disewakan dikembalikan lagi kepada pemilik dan bila penyewa sudah di kenal dengan baik atau kerabat dekat. Akan tetapi masih banyak para penyewa yang melakukan wanprestasi seperti tidak merawat mobil yang disewa dengan baik dan terlambat dalam pembayaran dan pengembalian mobil.

Sedangkan kewajiban penyewa harus membayar uang sewa tepat waktu, merawat dan menjaga mobil yang disewa dengan baik dan mendapatkan mobil yang disewa dalam keadaan baik dan layak jalan. Apabila penyewa lalai atau dalam hal itu maka penyewa diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sanksi yang diberikan merupakan salah satu penyelesaian wanprestasi yang terjadi dari pihak penyewa.

Sewa menyewa merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang dibolehkan oleh Islam, namun yang tidak dibolehkan apabila di dalam pelaksanaannya terdapat wanprestasi atau penyimpangan yang dapat merugikan orang lain. Menurut penulis bahwa pelaksanaan sewa menyewa yang terdapat pada CV. Pandawa Ban di Pekanbaru dengan penyewanya belum sesuai dengan hukum Islam, karena masih banyak wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | |
| NOTA DINAS | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| ABSTRAK | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 9 |
| C. Permasalahan | 9 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| A. Sejarah Berdirinya CV. Pandawa Ban..... | 14 |
| B. Struktur Organisasi | 15 |
| C. Tinjauan Umum Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor di Perusahaan..... | 17 |
| BAB III SEWA MENYEWA DALAM ISLAM | |
| A. Pengertian Sewa Menyewa..... | 21 |
| B. Dasar Hukum Sewa Menyewa | 23 |
| C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa | 25 |
| D. Resiko dalam Sewa Menyewa | 29 |
| E. Kewajiban Orang yang Menyewakan dan Penyewa | 30 |
| F. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa..... | 32 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN | |
| A. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada CV. Pandawa Ban..... | 36 |
| B. Hak dan Kewajiban Para Pihak serta Penyelesaian Kasus Terhadap Wanprestasi dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa | 41 |
| C. Tinjauan Hukum Islam | 51 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

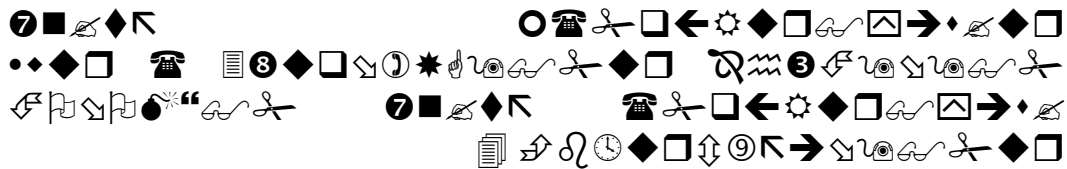
Dalam pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia telah banyak menghasilkan kemajuan diberbagai bidang. Hasil dari kemajuan itu telah banyak membuat masyarakat atau individu dan berusaha lebih giat lagi, demi cita cita yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Masyarakat di kota Pekanbaru mau tidak mau harus mengejar ketinggalannya diberbagai bidang, apalagi sekarang menyongsong era pasar bebas, maka pengembangan yang baik untuk kota Pekanbaru adalah pengembangan ekonomi, yaitu dalam bidang perdagangan, industri, perseroan, pengangkutan (transportasi) dan kegiatan lainnya dalam proyek pembangunan.

Hal ini mengingat bahwa pada saat ini Negara sedang giat giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, begitu juga dalam bidang pengembangan jasa transportasi, termasuk dikota Pekanbaru yang juga ikut melaksanakan pembangunan di bidang pengembangan transportasi tersebut. Meskipun begitu tidak jarang pihak swasta ikut serta dalam upaya menggalang kebijaksanaan pemerintahan tersebut.

Manusia juga sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat dan senantiasa berhubungan satu sama lainnya, selalu bekerja dan tolong

menolong. Hal ini digambarkan oleh Allah SWT, dalam firmanNya yang berbunyi:



Artinya: "Bertolong tolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan"¹. (Q.S Al Maidah : 2)

Meskipun ayat diatas secara tekstual tidak menunjukan dalil di syariatkan (*Ijarah*), namun secara konstektual sebagian besar ulama berdalil kepada ayat tersebut. Islam membenarkan adanya sewa menyewa (*Ijarah*) sebagai salah satu bentuk perikatan dalam bermuamalah.

Di antara perjanjian kerja sama manusia adalah melakukan sewa menyewa, dimana dalam Islam praktek tersebut dikenal dengan istilah *Ijarah*. *Ijarah* (Sewa menyewa) menurut bahasa berarti "balasan" atau imbalan" yang diberikan sebagai upah sesuatu pekerjaan. Sedangkan menurut istilah berarti suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia².

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Alqu'an, 1984), h. 156.

² A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru Susqa. Press, 2000), Cet.1, h. 107.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* jilid 13 menjelaskan bahwa sewa menyewa (*Ijarah*) adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian³.

Namun dalam bahasa Indonesia yang menyewakan ialah mempersewakan, memberi pinjaman dengan memungut uang sewa. Sedangkan sewa adalah pemakaian atau peminjaman sesuatu dengan membayar uang.

Kemudian, agar pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini berjalan sebagaimana mestinya menurut tuntunan agama Islam. Maka agama menghendaki agar senantiasa diperhatikan ketentuan ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut yang tidak merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya maksud mulia yang diinginkan oleh agama⁴.

Pada pokoknya sewa menyewa itu adalah untuk memenuhi setiap macam kebutuhan yang dibutuhkan manusia itu sendiri. Karena Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Selain sebagai pusat pemerintah, juga sebagai pusat bisnis, apalagi sebahagian masyarakat kota Pekanbaru bermata pencarian dibidang perdagangan. Salah satu yang menunjang kegiatan perdagangan tersebut adalah sarana transportasi.

Kendaraan roda empat ini merupakan sarana transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat pada umumnya. Hal ini mengingat tidak semua orang bersedia atau mampu untuk membeli kendaraan dalam jumlah banyak, karena keterbatasan dana.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), Cet.1, Jilid 13, h. 7

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), Cet.1. h. 30.

Untuk itu perusahaan mengambil kebijaksanaan untuk melakukan penyewaan mobil, karena hal ini dianggap ekonomis dan menguntungkan. CV Pandawa Ban sebagai pihak pemilik mobil telah membantu pihak penyewa, yaitu dengan cara menyewakan kendaraan bermotor roda empat yang dapat mempermudah atau memperlancar pekerjaan pihak yang menyewa.

Sebelum CV Pandawa Ban menyewakan kendaraan bermotor kepada pihak penyewa terlebih dahulu dilakukan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang saling membentuk hak dan kewajiban. Artinya dari hubungan sewa menyewa yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama sebagai akibatnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Jadi, apa yang menjadi kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian sewa menyewa akan menjadi hak pihak lainnya dan demikian pula sebaliknya. Apabila diperhatikan realitas yang ada dimasyarakat, khususnya di kota Pekanbaru banyak pemilik kendaraan bermotor roda empat yang menyewakan kendaraannya tersebut. Biasanya disewakan dalam jangka perhari, perminggu, perbulan bahkan pertahun.

Proses untuk memperoleh kendaraan bermotor roda empat sangatlah mudah. Calon penyewa cukup menghubungi pemilik kendaraan atau datang langsung ke lokasi dan menanyakan apa apa sajakah syaratnya. Adapun syarat-syarat yang diminta oleh pemilik kendaraan adalah menyerahkan fotokopi KTP, KK, rekening listrik, sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik dengan penyewa. Dan pembayarannya dibayar pada saat serah terima

kendaraan bermotor yang besarnya dalam tarif perhari Rp. 350.000,-⁵. Pihak penyewa diberi kesempatan untuk memilih jenis kendaraan yang akan disewanya dan memeriksa apakah kendaraan yang akan disewa tersebut telah layak jalan atau tidak.

Bila pihak penyewa telah menganggap bahwa kendaraan yang akan disewa tersebut telah layak jalan, maka untuk selanjutnya pihak yang menyewakan memberikan tawaran harga kepada pihak penyewa. Bilamana pihak penyewa setuju dengan harga sewa tersebut, maka dilanjutkan dengan membuat suatu perjanjian yang disebut perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor. Dalam perjanjian sewa menyewa ini dibuat dalam bentuk tertulis yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Sedangkan perjanjian didalam pasal 1313 kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”⁶.

Kendaraan milik CV Pandawa Ban disewakan mengingat CV Pandawa Ban ini adalah sebuah perusahaan khusus menyewa kendaraan bermotor roda empat, dimana penyewa menggunakannya untuk kegiatan pengawasan, acara keluarga, survey ke lokasi kerja dan lain lain. Adapun jenis kendaraan yang

⁵ Fajar (Penyewa Kendaraan Bermotor Roda Empat), *wawancara*, Pekanbaru tanggal 28 Februari 2008

⁶ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Cet ke-1, h. 282.

disewa oleh penyewa kepada CV Pandawa Ban ini adalah mobil *Kijang, Inova, Terios, Avanza, dan Xenia*⁷.

Perjanjian sewa menyewa menurut pasal 1548 kitab Undang Undang hukum perdata adalah “ Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”⁸.

Ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah mengingat adanya permasalahan yang muncul dalam perjanjian ini, yaitu pihak penyewa telah melakukan wanprestasi, yaitu melakukan keterlambatan (lalai) dalam pembayaran dan pengembalian kendaraan bermotor.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya yaitu, Wanprestatie yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah di tetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian atau perikatan yang timbul karena Undang Undang. Jadi wanprestasi itu sendiri adalah Alpa, Lalai, Sesuatu prestasi yang buruk, melanggar perjanjian bila melakukan atau berbuat sesuatu yang tak boleh dilakukan, tak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan⁹.

⁷ Abdul (Penyewa kendaraan Bermotor Roda Empat), *wawancara*, Pekanbaru tanggal 02 Maret 2008.

⁸ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Ibid*, h. 318.

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:PT. Intamasa, 2002), Cet ke-1, h. 43

Ada empat macam bentuk wanprestasi yaitu: tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak semestinya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dibatalkan.

Dari pasal 1243 KUH Perdata ternyata bahwa pada umumnya wanprestasi itu dinyatakan setelah dinyatakan lalai, akibat dari pelanggaran perjanjian atau wanprestasi ini, maka hukum yang dapat digunakan adalah;

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur
2. Pembatalan perjanjian
3. Pemilihan resiko
4. Membayar biaya perkara

Karena wanprestasi mempunyai akibat akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah sipenyewa melakukan wanprestasi dan kalau disangkal harus dibuktikan dimuka hakim.

Namun pada kenyataannya gejala yang sering ditemui dilapangan bukan hanya sekedar lalai, tetapi apabila penyewa sudah tidak sanggup lagi memenuhi kewajibannya sebagai penyewa, dalam memberikan setorannya kepada pemilik mobil, dan sebelum mobil yang disewa tersebut ditarik oleh pemilik, maka mereka melakukan kecurangan seperti mengganti alat-alat mobil yang asli dengan alat-alat yang palsu.

Contoh kasus, Pak Rafi yang tinggal di jalan Serayu menyewa satu unit kendaraan bermotor roda empat merk *Inova* dengan BM 1390 GA, selama sepuluh hari dengan harga per harinya Rp. 350.000,- jadi totalnya Rp.

3.500.000,-. Pak Rafi menyewa untuk pergi keluar kota, dimana Pak Rafi ingin menghadiri pernikahan adiknya. Setelah acara pernikahan adiknya selesai dan masa sewa mobilpun sudah habis. Namun Pak Rafi belum juga mengembalikan mobil tersebut kepada CV Pandawa Ban, Sedangkan perjanjian tersebut telah ditentukan tentang waktu pengembalian mobil, sebagaimana dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat pada pasal 3 yang mana apabila pihak kedua lalai dalam hal pasal 01. 02, maka pihak kedua setuju dikenakan denda sebesar 10% dari tarif pasal 01 untuk tiap keterlambatan pengembalian kendaraan.

Hal ini juga dialami CV Pandawa Ban dimana pihak penyewa (Pak Tarmizi) tidak menjaga dan merawat mobil yang disewanya dengan baik, dengan adanya penyimpangan dan kecurangan sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi pemilik kendaraan.

Pembayaran uang sewa dibayar secara tunai. Pada saat penyewa dan yang menyewakan setuju, setelah kesepakatan itu maka penyewa dapat membawa mobil yang disewanya. Berbeda kalau penyewa menyewa mobil hingga beberapa bulan, dan untuk pembayaran bulan ke dua dan seterusnya pembayaran dilakukan setiap tanggal yang sudah disepakati untuk setiap bulannya, disini penyewa sudah menunggak hingga tiga bulan, selain itu pihak penyewa kurang dapat memenuhi kewajibannya untuk menjaga kendaraan yang disewanya¹⁰.

¹⁰ Suwito, (Pimpinan CV Pandawa Ban), *wawancara* , Pekanbaru tanggal 3 Maret 2008

Dengan ditetapkannya waktu dan batas pelaksanaan perjanjian, maka perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat ini termasuk kepada perikatan dengan ketetapan waktu.

Mengenai ketetapan waktu, Abdul Kadir Muhammad menyebutkan: “Maksud ketetapan waktu adalah pelaksanaan perikatan digantungkan pada waktu yang ditetapkan. Waktu yang ditetapkan itu adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya sudah pasti, atau berupa tanggal yang sudah ditetapkan”¹¹.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **Wanprestasi Pada Penyewaan Kendaraan Bermotor Roda Empat di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi kasus pada CV. Pandawa Ban di Pekanbaru).**

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarah dan memperjelas ruang lingkup dalam penelitian ini maka wilayah penelitian dibatasi dan difokuskan pada persoalan “Wanprestasi Pada Penyewaan Kendaraan Bermotor Roda Empat ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada CV Panadawa Ban Pekanbaru)”.

C. Permasalahan

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah :

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), Cet ke-1, h. 46

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat pada CV. Pandawa Ban di Pekanbaru?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa, serta penyelesaian kasus terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan sewa menyewa?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wanprestasi pada penyewaan kendaraan bermotor roda empat tersebut ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat pada CV. Pandawa Ban di Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa, serta penyelesaian kasus terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan sewa menyewa.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang wanprestasi pada penyewaan kendaraan bermotor roda empat yang terjadi pada CV. Pandawa Ban di Pekanbaru.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat.
2. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya masalah sewa.

3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada fakultas syariah dan ilmu hukum.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru, tepatnya pada CV. Pandawa Ban di jalan Durian, Telp. (0761 7046451) Labuh Baru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah wanprestasi pada penyewaan kendaraan bermotor roda empat pada CV. Pandawa Ban di Pekanbaru, sedangkan yang menjadi objeknya adalah penyewa dan pemilik kendaraan bermotor roda empat.

3. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan CV Pandawa Ban di Pekanbaru yang berjumlah 15 orang, dan penyewa sebanyak 300 orang pertahun 2007. Tetapi karena keterbatasan waktu maka penulis mengambil sampel dari karyawan CV Pandawa Ban sebanyak 5 orang yang mewakili. Sedangkan dari penyewa diambil sample sebesar 10% dari populasi yaitu sebanyak 30 Orang, dengan menggunakan sistem *random sampling*.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari responden, dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari pimpinan CV Pandawa Ban di Pekanbaru melalui wawancara.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan tidak langsung, dalam hal tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan (KUHP Perdata), arsip dan literatur yang terkait erat dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Observasi, yaitu cara pengumpulan data yang penulis lakukan dengan mengamati gejala yang ada dilapangan.

Wawancara, yaitu bertanya langsung kepada responden dengan menghubungi langsung.

Angket, yaitu data data yang diperoleh dengan mengajukan beberapa daftar pertanyaan dalam bentuk tulisan, kemudian di kelompokkan, di edit dan di tabelkan.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif, yakni setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, penulis menjelaskan secara rinci sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami dengan jelas kesimpulan akhirnya. Penggambaran ini menggunakan metode Kualitatif.

7. Metode Penulisan

- a. Metode Deskriptif, yaitu dengan jalan menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan data data yangn diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Metode Deduktif, yaitu mengemukakan persoalan secara umum kemudian di ambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Metode Induktif, yaitu mencari data data yang khusus untuk menarik kesimpulan yang umum.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan menyusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB 1 : PENDAHULUAN**, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**, Yang terdiri dari Menguraikan sejarah ringkas perusahaan, struktur organisasi dan Tinjauan umum perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor
- BAB III : MENGGAMBARKAN SECARA UMUM Tentang Sewa Menyewa** dalam hukum Islam yang terdiri dari pengertian sewa menyewa, dasar hukum, rukun dan syarat, resiko dalam sewa menyewa, hak dan kewajiban baik penyewa maupun yang memberi sewa, berakhirnya perjanjian sewa menyewa.

BAB IV : PEMBAHASAN Tentang Wanprestasi pada Penyewaan Kendaraan Bermotor Roda Empat pada CV. Pandawa Ban di Pekanbaru yang terdiri bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, penyelesaian kasus terhadap wanprestasi dalam sewa menyewa tersebut serta bagaimana tinjauan hukum Islam.

BAB V : PENUTUP, Yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya CV. Pandawa Ban

Pada mulanya CV. Pandawa Ban didirikan dengan nama CV. Pandawa, pada tanggal 12 Januari 1990 dengan akta pendirian Nomor 3 yang dikeluarkan oleh notaris Ali Asjoedjir di Pekanbaru. Pada waktu itu CV. Pandawa masih merupakan perusahaan yang kecil dengan Suwito sebagai pemilik sekaligus direktornya. Dalam pengelolaan perusahaan CV. Pandawa bekerja sama dengan CV. Widya Motor di kota Madya Daerah tingkat II Pekanbaru. Saat itu CV. Pandawa hanya bergerak dibidang perbengkelan dan perdagangan. Didalam perdagangan khusus menjual alat-alat otomotif seperti: Oli, Ban, Baterai dan sebagainya.

Dalam menjalankan usaha kerjasama tersebut, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Maka untuk itu diangkat seorang yang bernama Jasrul untuk berjabat sebagai wakil direktur dan pelaksanaan diperusahaan ditunjuklah seorang yang bernama Samanthe.

Dalam menjalankan kerjasama tersebut, peralatan yang digunakan semuanya milik CV. Widya Motor. Selain itu CV. Pandawa juga memasukan tenaga kerja, akibatnya terjadilah kerjasama yang baik.

Pada saat itu mulailah CV. Pandawa mengalami peningkatan yang sangat baik dalam menjalankan usahanya. Namun pada tahun 2002 dikeluarkan lagi Akte Nomor 24 tanggal 29 April oleh Notaris yang sama dimana CV.

Pandawa ini menjadi CV. Pandawa Ban dan dilakukan juga perubahan besar besaran terhadap teman serikat.

CV. Pandawa Ban ini mulai menjalankan usahanya kembali. Adapun sarana atau peralatan kerja yang dimiliki perusahaan adalah:

- a. Menjalankan usaha reparasi/perbengkelan mobil
- b. Menjual alat-alat atau suku cadang mobil
- c. Tukat tambah mobil baru/bekas
- d. Sewa menyewa mobil¹

Dalam hal ini penyediaan mobil CV. Pandawa Ban menyediakan 13 Unit yang dapat dipergunakan atau disewakan sewaktu waktu. Untuk melaksanakan usahanya, CV. Pandawa Ban memperkerjakan pekerja sebanyak 15 orang yang di antaranya supir yang apabila si penyewa menginginkan seorang supir dalam hal menyewa mobil.

B. Struktur Organisasi

Setiap perusahaan yang beroperasi baik perusahaan yang dimiliki negara maupun swasta harus mempunyai sesuatu struktur organisasi. Setiap personil yang ditugaskan pada jabatan yang dipegang saat itu, mengetahui tugas dan tanggung jawabnya serta kepada siapa ia harus melimpahkan wewenangnya agar pekerjaan tersebut lebih mudah dilaksanakan.

Kekuasaan yang telah mereka pegang atau yang telah mereka dapatkan harus di pertanggung jawabkan karena tugas yang telah didapatkan adalah

¹ Wahyu, (28 Tahun), Karyawan pada CV. Pandawa Ban, wawancara, Pekanbaru Kamis Tanggal 17 April 2008

suatu usaha yang telah mereka raih selama bekerja di perusahaan tersebut. Setelah melihat hasil kerjanya selama ini begitu bagus maka para personil sangat puas yang akan memilih anggota yang lain untuk memimpin.

Tugas masing masing bagian yang tergambar dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut²

a. Pemilik

Pemilik merupakan orang yang memiliki perusahaan yang mempunyai modal dan berusaha melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan untuk dirinya serta orang lain dan dengan bantuan orang lain.

b. Manajer

Merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di perusahaan ini yang mendapat kepercayaan oleh pemilik untuk menjalankan dan mengelola perusahaan guna mencapai tujuan yang dimaksud oleh pemilik.

c. Bagian Administrasi

Bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya administrasi perusahaan serta pengaturan barang masuk dan keluar.

d. Bagian Keuangan

Bagian ini mengatur administrasi keuangan agar berjalan dengan baik, melakukan perencanaan dan pengeluaran kas serta arus balik jangka pendek dan jangka panjang dan memberikan laporan keuangan kepada menejer dan pemilik.

² Suwito, (35 Tahun), Pimpinan pada CV. Pandawa Ban, wawancara, Pekanbaru Jum'at Tanggal 18 April 2008

e. Bagian Legalisasi

Bertugas menyiapkan seluruh proses kontrak sewa menyewa, menerima seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur dan penandatanganan kontrak serta memberitahukan atau mengingatkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur sesuai dengan isi kontrak.

f. Bagian Logistik

Bertanggung jawab terhadap masalah barang barang di perusahaan yang menyangkut kebutuhan termasuk perlengkapan perlengkapan lainnya.

C. Tinjauan Umum Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan bermotor di Perusahaan

Perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor pada saat ini terus mengalami kemajuan, khususnya di Kota Pekanbaru. Hal ini mengingat kebutuhan akan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan atau transportasi sangat diperlukan. Tujuan menyewakan kendaraan bermotorpun bermacam macam, tergantung dari kebutuhan orang yang menggunakannya.

Selain mengacu pada pengaturan perjanjian sewa menyewa pada umumnya, para pihak juga menambahkan tentang pengaturan pengaturan dalam perjanjian, dalam hal ini para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tidak bertentangan dengan aturan aturan yang ada. Aturan aturan yang dibuat tersebut merupakan suatu undang undang yang harus mereka taati. Sehingga jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi dari perjanjian tersebut maka terhadap pihak yang telah melakukan wanprestasi akan diberi sanksi.

Adapun mengenai isi perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor pada umumnya memuat³:

1. Para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa kendaraan bermotor;
2. Spesifikasi kendaraan yang disewa, dalam hal ini para pihak menyetujui tentang jenis kendaraan yang disewa;
3. Masa perjanjian, dalam hal ini berkenaan dengan mulai dilakukannya sewa menyewa hingga batas waktu perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor tersebut;
4. Ruang lingkup perjanjian, yaitu memuat batasan hak dan kewajiban dari masing masing pihak terhadap kendaraan bermotor yang disewa tersebut, termasuk di dalamnya perbaikan dan perawatan serta penggantian kendaraan bermotor;
5. Harga sewa, merupakan besar jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan kendaraan bermotor;
6. Cara pembayaran, dalam hal ini berkenaan dengan cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak penyewa terhadap harga sewa kendaraan berrmotor yang disewanya. Cara melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan para pihak, apakah dilakukan dengan cara tunai atau melalui rekening bank. Pembayaran dengan melalui rekening bank ini lebih banyak digunakan mengingat cara ini lebih mudah dan praktis, serta dapat dijamin keamanannya:

³ Nina, (25 Tahun), Bagian Keuangan CV.Pandawa Ban, *wawancara*, Pekanbaru Sabtu Tanggal 19 April 2008

7. Asuransi, hal ini sangat penting guna menjamin keamanan baik bagi pihak yang menyewakan maupun pihak yang menyewa apalagi terjadi resiko terhadap kendaraan yang disewa tersebut⁴;
8. Hukum yang berlaku, memberi suatu pengertian bahwa apabila terjadi suatu perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan mufakat, maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan masalah ini pada tempat yang telah disepakati, dalam hal ini Pengadilan atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI).

Sedangkan mengenai isi surat perjanjian penyewaan kendaraan yang di gunakan CV. Pandawa Ban adalah sebagai berikut:

Pasal 01 : Pihak pertama setuju menyewakan kendaraan bermotor, dan pihak kedua setuju dengan masa penyewaan.

Pasal 02 : Jika berakhir masa sewa pihak kedua hendak memperpanjang dengan memberitahukan satu hari sebelum berakhir kontrak sewa dan membayar sesuai ketentuan pada pasal 01.

Pasal 03 : Apabila pihak kedua lalai, maka pihak kedua setuju di kenakan denda sebesar 10% dari tarif pasal 01 untuk tiap jam keterlambatan pengembalian kendaraan.

Pasal 04 : Kendaraan yang di sewa pihak kedua benar- benar dalam keadaan baik dan layak jalan dan bersih, maka pihak kedua berkewajiban memelihara kondisi kendaraan sebagaimana keadaan kendaraan waktu di terima. Dan apabila dalam masa

⁴ *Ibid*

penyewaan pihak kedua melakukan pelanggaran, mengalami kerusakan, kehilangan, kecelakaan maka beban yang timbul atas mobil pihak pertama tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua.

Pasal 05 : Apabila dalam penyewaan pihak kedua melakukan penyalahgunaan kendaraan yang melanggar hukum, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua dan apabila dalam kasus di maksud mobil di sita pihak berwajib maka pihak kedua diwajibkan membayar sewa sebesar pasal 01 dan membayar biaya tebus kendaraan dimaksud pasal 01.

Pasal 06 : Apabila dalam masa penyewa pihak kedua membatalkan perjanjian ini maka segala bentuk kerugian yang di akibatkan oleh pembatalan perjanjian secara sepihak adalah menjadi tanggung jawab penuh pihak yang membatalkan perjanjian tersebut.

Pasal 07 : Hal-hal yang belum di atur dalam perjanjian sewa ini akan di sepakati kedua belah pihak secara musyawarah. Dan kedua belah pihak setuju memilih tempat kedudukan hukum yaitu di kantor Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pasal 08 : Barang yang terlarang tidak di bolehkan membawa.

BAB III

SEWA MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa pada kitab Undang Undang Hukum Perdata pada pasal 1548 B.W adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya¹.

Didalam kamus bahasa Indonesia sewa merupakan pemakaian, pinjaman sesuatu dengan membayar uang, yang boleh dipakai, dipinjam dengan membayar uang, uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu, biaya pengangkutan, seperti upah kendaraan, tambangan dan sebagainya²

Sedangkan di dalam Islam sewa menyewa dikenal dengan istilah *Ijarah*. Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), Cet. Ke- 36, h. 381

² Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya; Karya Abiditama, 2001), Cet. Ke- 1, h. 438

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda pendapat mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut :

” 1. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض

Artinya: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan.”

2. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah:

تسمية التعاقد على منفعة الأدمى وبعض المنقول لأن

Artinya: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

1. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والباحة بعوض وضعا

Artinya: “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”

2. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

تمليك منفعة بعوض بشروط

Artinya: “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat syarat.”

5. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah:

عقد موزع المبادلة على منفعة الشيء بمدة محدودة أى تملكها بعوض فهي
بيع المنافع

Artinya: “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”

7. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat syarat tertentu.”³

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa yaitu menjual manfaat, dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

Adapula yang mendefinisikan bahwa *ijarah* atau sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dengan terjadinya sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, yang dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja⁴.

B. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)

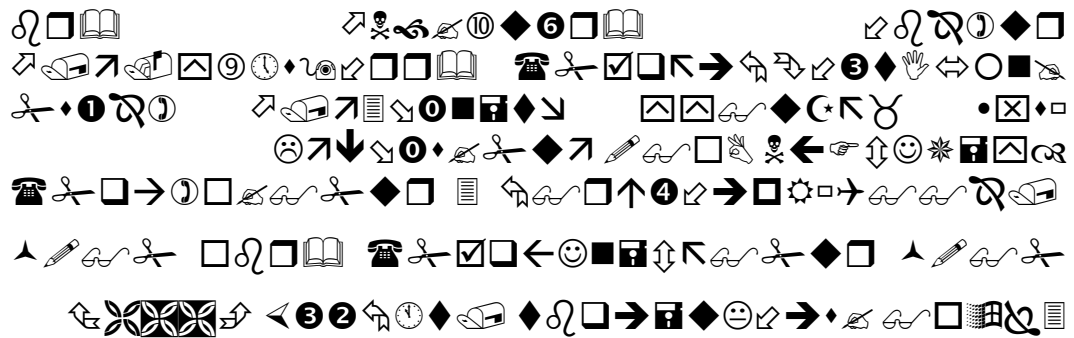
Sewa menyewa atau *ijarah* merupakan salah satu praktek bermuamalah yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kehidupan. Islam sangat menganjurkan kepada umat manusia untuk saling bekerja sama, yang bertujuan untuk mengikat tali persaudaraan yang baik bagi umat Islam.

Sehingga Islam sangat menghendaki dalam melakukan sewa menyewa atau *ijarah* tersebut sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku didalam hukum Islam. Dengan demikian para jumhur fuqaha membolehkan *ijarah*..

³ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2002), Cet Ke-1, h.114-115

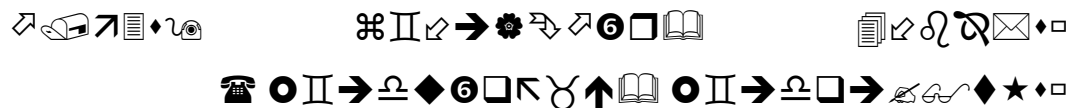
⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), Cet ke-1, h. 52

Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233, dan surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:



Artinya: “Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (al-Baqarah: 233)⁵.

Dan surat At-Thalaq ayat 6:



Artinya: “Kemudian jika mereka telah menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya”(al-Thalaq: 6)⁶.

Dan dalil dari hadist sahih ialah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah r.a. Ia berkata:

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قلت : واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر ر جلا من بني الد يل ها ديا خر يتا وهو على دين كفا رقر

⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1998), h. 29

⁶ *Ibid*, h. 446

يش قد قعا اليه ر احلتيهما و و اعداه عا ر بعد ثلاث ليا ل برا حلتيهما صبح ثلث (اخر جه

البخاري)

Artinya : “Dari ‘Aisyah r.a istri Nabi Muhammad Saw ia berkata: Rasulullah Saw dan Abu Bakar menyewa seorang petunjuk jalan yang ahli dari Bani Ad-dil, sedang orang tersebut memeluk agama orang orang kafir Qurasy. Kemudian Rasulullah Saw dan Abu Bakar memberi kendaraan kepada orang tersebut, dan mereka berdua berjanji kepada orang itu untuk bertemu di gua Tsur, sesudah berpisah tiga malam yang ketiga. (HR. Bukhori)⁷.”

C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sebelum mengetahui hukum dan syarat sewa menyewa perlu diketahui mengenai akad atau perjanjian. Karena akad atau perjanjian merupakan salah satu rukun dan syarat di dalam melakukan transaksi sewa menyewa.

Adapun pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu. perjanjian dalam kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dengan demikian istilah akad menurut fuqaha di artikan, perikatan antara ijab dan qabul menurut yang dibenarkan oleh syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan ijab adalah

⁷ Al Iman Abu Abdullah Muhammad bi Ismail Al Bukhari, *Terjemahan shahih Bukhari juz III*, Ahmad Sunarto (penerjemeh), (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992), Cet ke-1, h. 333

permulaan penjelasan yang lahir dari salah seorang yang berakad untuk menggambarkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang

memulainya. Dan qabul adalah yang lahir dari pihak yang lain setelah adanya ijab untuk menjelaskan persetujuannya. Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan, dan menimbulkan kewajiban atas masing masing secara timbal balik⁸

Sewa menyewa dalam Islam dapat dilaksanakan apabila sudah memenuhi beberapa rukun dan syarat sehingga secara yuridis perjanjian sewa menyewa memiliki kekuatan hukum, apabila perjanjian tersebut telah memenuhi rukun dan persyaratannya. Karena di dalam perjanjian sewa menyewa atau *ijarah* tersebut sangat di perlukan dan harus terpenuhi, dengan demikian pelaksanaan sewa menyewa atau *ijarah* dapat kita laksanakan dengan baik dan tidak akan saling merugikan antara kedua belah pihak.

Adapun rukun dan syarat syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Rukun ijarah

- a. Penyewa (musta'jir)
- b. Pemberi sewa (mu'jir)
- c. Obyek sewa (ma'jur)
- d. Harga sewa (ujrah)
- e. Manfaat sewa

⁸ Safii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2000), Cet ke-1, h. 26

- f. Ijab qabul (sighat)⁹

2. Syarat syarat sewa menyewa (Ijarah)

Untuk sah nya sewa menyewa, pertama sekali harus diperhatikan terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan buruk. Untuk sah nya perjanjian sewa menyewa diperlukan syarat syarat sebagai berikut:

1. Yang menyewakan dan penyewa ialah thamyiz (kira kira berumur 7 tahun), berakal sehat dan tidak ditaruh dibawah pengampuan.
2. Yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali¹⁰.
3. Masing masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya kalau didalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka penyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹¹

1. Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan. Artinya harus jelas dan terang mengenai obyek sewa menyewa, yaitu barang yang disewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
2. Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut, andainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.
3. Obyek sewa menyewa dapat di serahkan; Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian sewa menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa.

¹¹ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 65

4. Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama; Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa menyewa rumah, yang mana rumah itu digunakan untuk kegiatan prostitusi, atau menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian juga memberikan memberikan uang kepada tukang ramal. Selain itu juga tidak sah perjanjian pemberian uang (*ijarah*) puasa atau sholat, sebab puasa atau sholat termasuk kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.¹²

D. Resiko Dalam Sewa Menyewa (Ijarah)

Dalam hal perjanjian sewa menyewa, risiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang di persewakan, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang atau benda saja, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya, si penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya, kecuali apabila kerusakan barang itu di lakukan dengan sengaja atau dalam pemakaian barang

¹² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), Cet ke-1.h. 53-55

yang disewa, kurang pemeliharaan (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang seperti itu.¹³

Peraturan tentang risiko dalam sewa menyewa itu harus kita ambil dari pasal 1553, dalam pasal ini dituliskan bahwa, apabila barang yang disewa itu musnah karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum. Dari perkataan “gugur demi hukum” inilah di simpulkan bahwa masing masing pihak sudah tidak menuntut sesuatu apa dari pihak lawannya, hal mana berarti kerugian akibat musnahnya barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan. Dan ini memang suatu peraturan risiko yang sudah setepatnya, karena pada dasarnya setiap pemilik barang wajib menanggung segala risiko atas barang miliknya.¹⁴

E. Kewajiban Orang Yang Menyewakan Dan Penyewa

Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan baik dari pihak penyewa maupun yang menyewakan antara lain:

- a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Misalnya, memperbaiki mobil yang ia sewakan, mempersiapkannya untuk mengangkut dan untuk melakukan perjalanan; melengkapi rumah yang ia sewakan dengan segala perabotnya, memperbaiki kerusakan kerusakan

¹³ *Ibid*, h. 55.

¹⁴ Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), Cet ke-1, h. 69

didalamnya, dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam memanfaatkan rumah tersebut.

- b. Orang yang menyewa, ketika selesai menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana keadaan semula.
- c. Masing masing dari pihak penyewa maupun yang menyewakan tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan dengan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya, maka dalam hal ini ia boleh membatalkan akad.
- d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keluluasaan untuk memanfaatkannya. Apabila ia menghalangi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau bagian masa sewa, maka penyewa tidak berhak mendapatkan bayaran dari penyewaan tersebut, atau tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh. Hal ini di karenakan ia tidak memenuhi apa yang harus ia lakukan dalam akad *ijarah*, sehingga ia tidak berhak mendapatkan apa apa. Apabila orang yang menyewakan memberi keluluasaan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang disewakan, namun si penyewa membiarkannya selama masa penyewaan, maka ia tetap harus menyerahkan bayaranya secara utuh. Karena *ijarah* adalah akad yang wajib atas kedua belah pihak, maka dituntut terlaksananya hal hal yang harus terwujud didalamnya, yaitu kepemilikan orang yang

menyewakan terhadap bayaran dan kepemilikan penyewaan terhadap manfaat¹⁵.

Mengenai kewajiban dan hak penyewa maupun orang yang memberi sewa juga diatur di dalam pasal 1550 BW dan menyebutkan tiga macam kewajiban pokok dari pihak yang menyewakan:

1. Untuk menyerahkan (Leveren) barangnya kepada si penyewa
2. Untuk memelihara barangnya sedemikian rupa, sehingga barangnya dapat dipakai secara yang dimaksudkan.
3. Untuk berusaha supaya sipenyewa selama persetujuan sewa menyewa berjalan, selalu secara tentram dapat memakai dan menikmati barangnya yang disewa itu.

Dan pada pasal 1560 BW menyebutkan dua kewajiban dari sipenyewa yaitu:

1. Memakai barang sewaan secara yang sangat hati hati dan menurut tujuan dan maksud dari persetujuan sewa menyewa.
2. Membayar uang sewa pada waktu waktu yang ditentukan dalam persetujuan sewa menyewa¹⁶.

F. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Sebelum melakukan sewa menyewa atau *ijarah* biasanya dilakukan suatu perjanjian antara kedua belah pihak. Sehingga masing masing pihak

¹⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. 1, h. 485

¹⁶ Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), Cet ke-1, h. 61, 65-66

mendapatkan hak yang dikehendaki bersama. Perjanjian sewa menyewa berlaku selama masa perjanjian yang telah ditentukan belum berakhir. Bila masa itu sudah habis, perjanjian dipandang telah berakhir, dan tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya, dan barang sewaan tersebut harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya.

Tanpa perjanjian baru, sewa menyewa dipandang terhenti, kecuali bila ada keadaan yang memaksa untuk seberapa lamanya dilangsungkan. Misalnya bila seseorang menyewa tanah pertanian selama setahun. Bila pada saat masa masa perjanjian itu habis, ternyata masih ada tanaman yang belum dapat di ketam, maka untuk memberi kesempatan kepada penyewa untuk menikmati hasil tanamannya itu, ia dapat memperpanjang waktu sewaan, dengan pembayaran sewa yang pantas untuk waktu perpanjangan yang di perlukan tersebut¹⁷.

Pada dasarnya sewa menyewa adalah merupakan perjanjian yang lazim yang mana masing masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.

Bahkan jikapun salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal saja yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih tetap ada, sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan ataupun juga sebagai pihak penyewa.

¹⁷ A. Syafii Jafri, *op.cit.*, h. 117

Adapun hal hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Terjadi cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan.
3. Rusaknya barang yang diupahkan.
4. Terpenuhinya barang yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

Dengan pengertian lain, perjanjian *ijarah* itu bisa menjadi rusak atau dirusakkan apabila terdapat cacat yang tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diinginkan pada waktu perjanjian tersebut dilakukan ataupun sesudah perjanjian itu di lakukan. Perjanjian *ijarah* dapat rusak apabila apabila barang sewa itu mengalami kerusakan yang tidak dapat lagi di gunakan sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini pemilik barang juga dapat membatalkan barang yang di sewa tidak sesuai dengan ukuran kekuatan sewaan itu¹⁹.

Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa menyewa akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 122

¹⁹ Ahmad Ahar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), Cet. 1, h. 40

Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan atau pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya.

Apabila objek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa didalamnya. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa diatasnya²⁰

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), Cet. 1, h. 20

BAB IV
PEMBAHASAN WANPRESTASI PADA PENYEWAAN KENDARAAN
BERMOTOR RODA EMPAT PADA CV. PANDAWA BAN DI
PEKANBARU

1. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada CV. Pandawa Ban

Seperti halnya pada perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian sewa menyewa terdapat dua pihak yang mengadakan kontrak atau perjanjian, yaitu pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan. Dalam hal ini pihak penyewa lebih bersifat aktif, dimana pihak penyewa mendatangi pihak yang menyewakan untuk mengutarakan maksudnya (menyewa kendaraan), sedangkan pihak yang menyewakan lebih bersifat pasif, artinya hanya menanti adanya permintaan dari pihak penyewa.

Hasil wawancara penulis dengan Pimpinan CV. Pandawa Ban tanggal 2 Juni 2008 tentang bagaimanakah prosedur terjadinya sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat. Disini dijelaskan bahwa terlebih dahulu diawali dengan datangnya pihak kepada pihak yang menyewakan kendaraan bermotor roda empat, dalam kedatangan pihak yang ini adalah bermaksud atau tujuannya hendak menyewa kendaraan bermotor roda empat. Pihak penyewa diberi kesempatan untuk memilih jenis kendaraan yang akan disewanya dan memeriksa apakah kendaraan yang akan disewa tersebut telah layak jalan atau tidak.

Bila pihak penyewa telah menganggap bahwa kendaraan yang akan disewanya tersebut telah layak jalan, maka untuk selanjutnya pihak yang

menyewakan memberikan tawaran harga sewa kepada pihak penyewa, dimana harga satu unit perharinya adalah Rp.350.000,- dengan merek yang diinginkan. Bila mana pihak penyewa setuju dengan harga sewa tersebut, maka dilanjutkan dengan membuat suatu perjanjian yang disebut perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor, dalam perjanjian sewa menyewa ini dibuat dalam bentuk tertulis.

Kemudian pihak yang menyewakan memberikan petunjuk tentang prosedur sewa menyewa tersebut, maka yang menyewakan akan menyerahkan formulir yang harus diisi oleh penyewa. Formulir tersebut berisikan tentang :

- a. Nama lengkap
- b. Umur
- c. Jenis kelamin
- d. Status
- e. Pekerjaan
- f. Alamat

Kemudian mengenai data barang yang diisi oleh yang menyewakan harus sesuai dengan kendaraan yang diinginkan oleh penyewa sebagai berikut :

- a. Atas nama
- b. Merek kendaraan
- c. Berapa lama pemakaian
- d. Harga

Setelah itu pihak penyewa harus melengkapi data-data yang harus dilampirkan yaitu:

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy Kartu Keluarga
- c. Fotocopy rekening listrik

Bentuk perjanjian sewa menyewa antara penyewa dengan yang menyewakan adalah baku artinya perjanjian tersebut udah disediakan dan penyewa hanya membaca serta menandatangani perjanjian yang sudah disediakan tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pak Suwito selaku pimpinan CV. Pendawa Ban sebagai berikut :

“ Para penyewa yang berkeinginan untuk menyewa kendaraan bermotor roda empat, perusahaan telah menyediakan perjanjiannya dan penyewa hanya membacanya dan apabila disetujui maka perjanjian tersebut baru ditandatangani oleh kedua belah pihak”¹

Mengenai bentuk perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh CV Pendawa Ban dengan pihak penyewa dapat dilihat dari pertanyaan penulis yaitu bagaimanakah bentuk perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh CV Pandawa Ban dengan penyewa ? berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap 30 penyewa yang dijadikan sampel dari kuesioner yang diberikan kepada mereka mengenai bentuk perjanjian sewa menyewa CV. Pendawa Ban, dapat diperoleh data seperti terlihat pada tabel berikut ini:

¹ Suwito, 40 Tahun (Pimpinan CV.Pandawa Ban), *wawancara*, Pekanbaru tanggal 2 Oktober 2008

Tabel I
Jawaban Responden Tentang Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa

| No | Bentuk Perjanjian | Jumlah Jawaban | % |
|----|-------------------|----------------|-----|
| 1. | Tertulis | 30 | 100 |
| 2. | Lisan | 0 | 0 |
| | Jumlah | 30 | 100 |

Dari tabel I. di atas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa bentuk perjanjian sewa menyewa pada CV. Pandawa Ban adalah berbentuk tertulis, terbukti dari 30 responden (100%) seluruhnya menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut adalah tertulis. Dengan adanya bentuk perjanjian secara tertulis akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, bila ada gugatan di kemudian hari berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan CV. Pandawa Ban menyatakan bahwa :

“Perjanjian yang dibuat dalam sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat antara penyewa dengan yang menyewakan dilakukan secara tertulis hal ini dilakukan agar perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani menjadi pegangan bagi kedua belah pihak sebagai bukti bila ada gugatan dikemudian hari. Selama ini belum ada perjanjian yang dibuat kedua belah pihak yang dilakukan secara lisan.”²

Sebagaimana yang disebutkan oleh pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai pasal yang mendasari terbentuknya suatu perjanjian adalah bahwa untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

² *Ibid*

1. Adanya persetujuan kehendak (sepakat) antara pihak membuat perjanjian, dalam hal ini penyewa dengan pemberi sewa tentang harga sewa yang disewakan.
2. Adanya kecakapan para pihak yang membuat perjanjian sewa menyewa mobil, bahwa para pihak yang sudah jelas dan nyata cakap untuk bertindak di muka hukum sebagai subjek hukum, sebab setiap subjek hukum berhak untuk bertindak dimuka hukum.
3. Suatu hal tertentu, jelas sekali bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian sewa menyewa ini adalah mobil.
4. Sebab yang halal, jelas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat ini bukan hal yang dikecualikan oleh Undang Undang maupun kesusilaan dan ketertiban umum sesuai dengan azas kebebasan berkontrak³

Dalam hukum perjanjian dinyatakan bahwa dalam perjanjian sudah lahir dan terjadi semenjak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan kata lain perjanjian sudah ada apabila kedua belah pihak sepakat mengenai hal hal yang pokok yang telah diperjanjiakan.

Tentang prosedur dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan dapat dilihat dari jawaban responden atas pertanyaan penulis yaitu, bagaimanakah prosedur dalam pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan oleh penyewa ? Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1995), Cet. 1, h, 320

Tabel II.
Jawaban Responden Terhadap Prosedur Penyewaan Kendaraan
Bermotor Roda Empat pada CV. Pandawa Ban

| No | Prosedur | Jumlah Jawaban | % |
|----|----------------|----------------|-----|
| 1. | Cukup mudah | 30 | 100 |
| 2. | Berbelit-belit | 0 | 0 |
| 3. | Membingungkan | 0 | 0 |
| | Jumlah | 30 | 100 |

Dari tabel II. di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur sewa menyewa pada CV. Pandawa Ban cukup mudah, hal ini terbukti berdasarkan dari jawaban responden sebanyak 30 orang (100%) menyatakan prosedurnya cukup mudah, sehingga memberikan kemudahan bagi pihak penyewa dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa ini berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan CV. Pandawa Ban tentang prosedur perjanjian sewa menyewa dapat dilihat dibawah ini :

“ Dalam melaksanakan sewa menyewa pihak yang menyewakan berusaha untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada para penyewa. Dengan cara seperti ini pihak penyewa tidak merasa dipersulit dan secara tak langsung dapat memberikan keuntungan bagi pemilik kendaraan.”⁴

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa serta Penyelesaian Kasus Terhadap Wanprestasi dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa.

⁴ Wahyu, (25 Tahun), Karyawan CV.Pandawa Ban, *wawancara*, Pekanbaru tanggal 2 Oktober

Hal-hal yang menjadi hak kreditur pada perjanjian sewa menyewa sekaligus merupakan kewajiban bagi debitur karena itu untuk melihat apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, cukup dengan melihat apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hal ini disebabkan karena hak debitur merupakan kewajiban bagi debitur. Sebaliknya hak kreditur merupakan kewajiban bagi debitur, hal ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan unsur pasif dan unsur aktif⁵

Dalam konsep ini debitur adalah pihak yang pasif atau pihak yang berhutang yang berkewajiban melaksanakan sesuatu sedangkan kreditur adalah pihak yang aktif atau pihak yang berpiutang yang berhak atas sesuatu.

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak terdapat hak-hak maupun kewajiban antara kedua belah pihak. Bagaimana jaminan yang diberikan oleh penyewa dalam menyewa kendaraan bermotor roda empat pada CV. Pandawa Ban ? Apakah ada jaminan atau tidak. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel III.
Jawaban Responden Mengenai Apakah Ada atau Tidaknya Jaminan yang Diberikan kepada Penyewa

| No | Jawaban Responden | Jumlah Jawaban | % |
|----|-------------------|----------------|-----|
| 1. | Tidak ada jaminan | 30 | 100 |
| 2. | Ada jaminan | 0 | 0 |
| | Jumlah | 30 | 100 |

⁵ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: RajaGarafindo, 1985), Cet Ke-1. h. 14

Dari Tabel III di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 30 orang (100%) dari responden yang mengadakan perjanjian sewa menyewa tanpa ada jaminan lain selain mobil itu sendiri. Hal ini sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh CV. Pandawa Ban secara fiducia atau kepercayaan, dimana benda yang menjadi objek jaminan tetap dapat dipergunakan oleh si penyewa.

Tidak gampang menjaminkan sesuatu benda dengan tetap menguasai benda itu oleh debitur tanpa menimbulkan resiko bahaya bagi kreditur jika tidak disertai alat pengaman yang ketat. (Sri Soedewi Masjhoem Sofwan, 1990 : 58). Namun demikian sipemilik tetap dilindungi, jika sipenyewa mengalihkan atau menjual obyek sewa tersebut (mobil) , maka sipenyewa terancam oleh hukum pidana (penggelapan).

Bentuk jaminan secara fiducia memberikan keuntungan kedua belah pihak, dimana sipemilik merasa aman karena barangnya tidak akan di jual atau dialihkan oleh sipenyewa selama harga belum di bayar lunas, sedangkan bagi sipenyewa dapat mencicil harga yang tak mampu dibayar, dan seketika dapat menikmati barangnya⁶.

Untuk mengetahui apakah responden mengetahui hak maupun kewajibannya dalam perjanjian sewa menyewa, dapat dilihat pada tabel berikut.

⁶ R. Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), Cet 1, h. 52

Tabel. IV.
Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Mengenai Isi Perjanjian

| No | Pengetahuan Responden | Jumlah Jawaban | % |
|----|-----------------------|----------------|------|
| 1. | Mengetahui | 25 | 83,3 |
| 2. | Tidak mengetahui | 5 | 16,7 |
| | Jumlah | 30 | 100 |

Berdasarkan Tabel IV. Di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden ternyata mengetahui isi dari perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu sebanyak 25 orang (83,3) dan sebanyak 5 orang (16,7) tidak mengetahui perjanjian yang telah ditandatanganinya.

Oleh karena perjanjian itu berbentuk baku dalam pengertian bahwa telah terlebih dahulu disediakan formulir perjanjian, meskipun terdapat pihak yang mengetahui maupun yang tidak mengetahui secara umum dia harus tunduk kepada perjanjian yang telah ditandatanganinya.

Namun demikian menurut penulis ada baiknya sebelum perjanjian ditandatangani, pihak CV Pandawa Ban sebagai pemilik kendaraan terlebih dahulu menjelaskan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak :

Adapun hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak adalah⁷

a. Hak penyewa yaitu:

- Berhak untuk mendapatkan barang setelah uang muka dibayar
- Berhak untuk mendapatkan penyerahan hak milik atas kendaraan tersebut.

b. Kewajiban penyewa yaitu :

⁷ Nina, (25 Tahun), Bagian Keuangan CV. Pandawa Ban, wawancara, Pekanbaru Tanggal 3 Oktober 2008

- Membayar uang muka beserta angsurannya kepada pemilik sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan
- Membayar keterlambatan 10% perhari terhitung mulai tanggal jatuh tempo

c. Hak yang menyewakan yaitu :

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran
- Berhak untuk mendapatkan angsuran serta denda atas keterlambatan.
- Menarik kendaraan bila penyewa lalai memenuhi perjanjian.

d. Kewajiban yang menyewakan yaitu :

- Berkewajiban untuk menyerahkan barang jaminan (mobil) setelah uang muka dibayar
- Menyerahkan hak milik atas mobil untuk dinikmati penyewa.

Pertanggungjawaban terhadap kendaraan bermotor roda empat yang rusak atau hilang diluar kemauannya, penyewa diharuskan untuk mengganti. Hal ini kontradiktif dengan ketentuan yang diatur dalam pasal KUH Perdata yang menyatakan :

“ Jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan musnah, tak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, sedemikian sehingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya berhutang, dan sebelum ia lalai dalam menyerahkannya “⁸

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *ibid*, h. 32

Berdasarkan ketentuan pasal diatas maka si berhutang bebas dari segala kewajiban asal musnah atau hilangnya barang tersebut diluar kesalahannya. Namun demikian jika dilihat dari suatu perjanjian sewa menyewa antara CV. Pandawa Ban dengan penyewa menyatakan :

“ Penyewa dengan ini menegaskan bahwa apabila dalam penyewaan penyewa melakukan penyalahgunaan yang melanggar hukum, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa dan tak dapat menjadi alasan untuk penundaan pembayaran”⁹

Berdasarkan ketentuan dari surat perjanjian diatas si penyewa tetap harus menanggung segala kewajibannya walaupun hutang atau musnahnya barang diluar kesalahannya.

Terhadap resiko akibat kecurangan atau wanprestasi ini pernah dipersoalkan dengan pihak yang berwajib, seperti apa yang dikatakan oleh Suwito, ia pernah merasa kehilangan mobil yang ia sewakan, dan telah menghabiskan waktu berjam-jam bahkan perhari, bahkan sampai 2 minggu untuk mencari mobil, dan ternyata mobil yang disewa oleh penyewa (Sahril, 30 tahun) sudah hilang atau di bawa kabur dan semua aksesoris dari mobil sudah diganti baik dari BM (No Polisi) dan warna mobil., padahal ia sudah habis jangka waktu dan pemilik merasa kesal dengan penyewa mobil. Semenjak itu Suwito melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib, dalam proses seminggu polisi dan beberapa saksi berhasil menemukan mobil tersebut. Kasus yang terjadi antara pemberi sewa dengan penyewa di Kota

⁹ Nina, (25 Tahun),Bagian Keuangan CV. Pandawa Ban, *wawancara*, Pekanbaru Tanggal 3 Oktober 2008

Pekanbaru selama ini diselesaikan secara hukum baik itu hukum adat atau hukum negara, selama ini jikalau terjadi kasus wanprestasi diantara mereka, mereka langsung menyerahkan ke hukum, seandainya kasus seperti ini masih bisa dengan jalan perdamaian, maka akan dimusyawarahkan antara pemilik dengan penyewa, tetapi kalau tidak membuahkan hasil, mereka langsung dengan jalan hukum yang telah ada sesuai dengan isi pasal 07.

Penulis telah menanyakan kepada pemilik mobil tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak penyewa, bahwa alasan telah dilakukannya wanprestasi oleh pihak penyewa adalah, karena pihak penyewa terlambat memberikan pembayaran dan pengembalian mobil kepada pemilik sewa bahkan penyewa tidak merawat dan menjaga kendaraan yang di sewanya dengan baik. Sehingga pemilik mobil merasa sangat di rugikan bahkan antara pemilik dengan penyewa tidak bergaul lagi seperti biasanya dan tidak tegur sapa.

Namun mesti diingat bahwa kesemuanya itu adalah semata-mata tergantung kepada isi perjanjian yang dibuat dengan mengingat asas kebebasan berkontrak.

Mengenai cara penyerahan mobil yang menjadi objek sewa menyewa yang dilakukan oleh yang menyewakan kepada penyewa, penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut : Bagaimanakah cara penyerahan mobil yang menjadi obyek sewa dilakukan oleh yang menyewakan kepada penyewa ? Jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel V.
Jawaban Responden Mengenai Penyerahan Mobil

| No | Saat Penyerahan | Jumlah Jawaban | % |
|----|-------------------------------------|----------------|-----|
| 1. | Pada saat perjanjian ditandatangani | 30 | 100 |
| 2. | Setelah ditandatangani | 0 | 0 |
| | Jumlah | 30 | 100 |

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel V. diketahui bahwa seluruh responden yaitu sebanyak 30 orang (100%) menjawab bahwa penyerahan barang dilakukan pada saat ditandatangani surat perjanjian.

Berdasarkan wawancara penulis lakukan dengan pimpinan CV. Pandawa Ban menyatakan bahwa penyewa langsung dapat membawa pulang mobil yang disewa.

Penyelesaian Kasus Terhadap Wanprestasi

Berkenaan dengan kelalaian (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam membayar angsuran maupun dalam mengembalikan kendaraan dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam hal penyewaan mobil pada CV. Pandawa Ban maka akan timbul akibat / resiko yang harus dipikul.

1. Debitur sama sekali tidak melakukan prestasi
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Terlambat melaksanakan prestasi
4. Melakukan perbuatan bertentangan dengan apa yang diperjanjikan¹⁰

¹⁰ R. Subekti, *op.cit*, h.45

Dalam pelaksanaan sewa menyewa monil pada CV. Pandawa Ban terdapat beberapa masalah sebagai akibat tidak dipenuhinya perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak diantaranya mengenai penunggakan pembayaran dan pengembalian kendaraan, masalah ini yang sering terjadi dalam perjanjian sewa menyewa. Hal ini terlihat dari daftar kuesioner yang penulis sebarakan kepada 30 orang responden, yang penulis tanyakan, apakah mereka menemui hambatan dalam melaksanakan angsuran. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh data sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel VI
Jawaban Responden Ada Atau Tidaknya Hambatan Yang Ditemui Untuk Memenuhi Angsurannya

| No | Jawaban Responden | Jumlah Jawaban | % |
|----|-------------------|----------------|------|
| 1. | Ya | 7 | 23,3 |
| 2. | Tidak | 23 | 76,7 |
| | Jumlah | 30 | 100 |

Dari tabel VI. Di atas dapat dilihat bahwa 7 orang responden (23,3%) menemui hambatan dalam membayar angsurannya. Sedangkan 23 orang (76,7%) tidak menemui hambatan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar dari responden tak menemui hambatan dalam memenuhi angsurannya.

Dalam hal terjadinya penunggakan pembayaran si pemilik sewa yang lebih aktif bertindak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Pada pasal 03 dalam surat perjanjian sewa menyewa, dikemukakan apabila penyewa lalai membayar uang sewanya / terlambat, maka penyewa

dikenakan denda administrasi 10 % sehari. Atas pertanyaan yang penulis ajukan pada responden mengenai apakah mereka dikenakan denda bunga atas keterlambatannya ? Jawaban responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VII.
Jawaban Responden Ada atau Tidaknya Dikenakan Bunga Atas Keterlambatan

| No | Jawaban Responden | Jumlah Jawaban | % |
|----|-------------------|----------------|-----|
| 1. | Ya | 30 | 100 |
| 2. | Tidak | 0 | 0 |
| | Jumlah | 30 | 100 |

Berdasarkan data tersebut bahwa seluruh responden menyatakan bahwa jika mereka terlambat dalam pembayaran akan dikenakan bunga.

Dalam hal terjadinya perselisihan antar kedua belah pihak maka terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah, jika tidak berhasil baru diselesaikan lewat pengadilan. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 07 dari surat perjanjian sewa menyewa.

” Segala peselisihan atau perbedaan antara pemilik dengan penyewa dalam perjanjian ini kan diselesaikan secara musyawarah dan kedua belah pihak setuju memilih tempat kedudukan hukum yaitu Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru”

Namun menurut CV. Pandawa Ban selama ini belum ada terjadi perselisihan yang diselesaikan lewat Pengadilan Negeri, karena perusahaan lebih mengutamakan musyawarah.

C. Tinjauan Hukum Islam

Islam adalah suatu agama yang tidak sempit teradap perubahan dan perkembangan zaman, artinya segala perubahan dan perkembangan itu dapat di akomodasi dengan catatan kesemuanya itu tidak bertentangan dengan nilai syara'. Terlebih lagi saat sekarang ini perkembangan semakin pesat sehingga hal itu mengakibatkan tuntutan bagi hukum Islam untuk menentukan kejelasan status hukumnya karena terkadang permasalahan yang terjadi tidak secara terperinci dijelaskan.

Namun demikian bukan berarti hukum Islam tidak mampu menjawab setiap permasalahan yang muncul. Agama Islam ingin umatnya menggunakan akal yang diberikan oleh Allah Swt untuk dapat menganalisa setiap perubahan dan perkembangan yang mereka hadapi.

Ijarah atau sewa menyewa merupakan salah satu bagian dari muamalah yang banyak dilakukan didalam kehidupan masyarakat. Disamping itu Islam juga sangat memandang betapa pentingnya hubungan bermuamalah, karena dengan melakukan muamalah dengan baik, maka akan tercipta hubungan harmonis dan ukhuwah Islamiyah yang baik diantara sesama muslim.

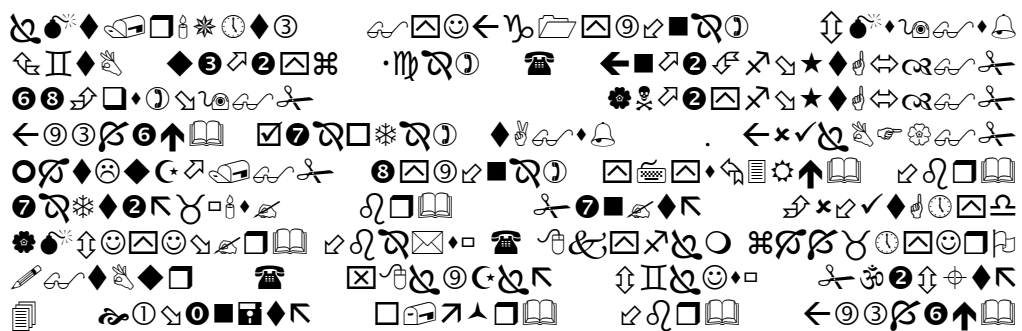
Islam memberikan aturan bahwa dalam masalah muamalah kedua belah pihak diharapkan saling menguntungkan dan bukan saling merugikan. Seseorang atau badan hukum yang menyewa hendaknya ia memelihara dengan baik dan tidak boleh melalaikannya, jika ia terbukti melalaikannya maka ia akan dikenakan sanksi dimana ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah melalaikan pelaksanaan sewa menyewa tersebut.

Pada bagian yang sebelumnya sudah dipaparkan dalam tulisan ini, baik yang telah diuraikan dalam pembahasan secara umum, maupun tentang pelaksanaan sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat di kota Pekanbaru, yang mana perjanjian sewa menyewa tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

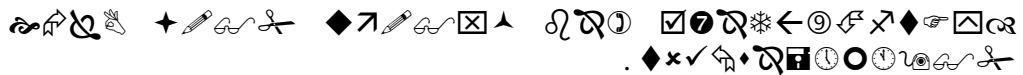
Melihat realitas yang terjadi dimasyarakat dalam pelaksanaan sewa menyewa, masyarakat harus mempunyai tujuan aktifitas dalam sewa menyewa. Adapun tujuan aktifitas sewa menyewa dalam pandangan Islam adalah untuk :

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana
2. Memenuhi kebutuhan keluarga
3. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
4. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah
5. Memenuhi kebutuhan jangka panjang¹¹.

Dan berdasarkan sifat dan kemanfaatannya penulis menyimpulkan bahwa sewa menyewa dalam hukum Islam diperbolehkan, ini dapat diperkuat dengan Firman Allah Surat al Qashash ayat 26 – 27 yang berbunyi :



¹¹ Suharwardi K. lubis, *Hukum Ekonomi Islam* , (Sinar Grafika, 2000), Cet ke-1. h 3



Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".¹²

Oleh sebab itu berdasarkan kepada apa-apa yang telah dikemukakan diatas, bahwa sewa menyewa pada CV Pandawa Ban di Pekanbaru. Selama tidak keluar dari ketentuan sewa menyewa yang berlaku yakni masih berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah keterlambatan pembayaran transaksi ini menurut Islam dibenarkan atau dalam konteks hukumnya mubah (boleh). Tetapi pada saat konsumen tidak dapat membayar angsuran setiap bulannya dengan lancar bahkan sampai menunggak, ini menjadi permasalahan yang mengakibatkan cacatnya kaidah dalam bermuamalah yang dianjurkan dalam Islam. Dengan kata lain, langkah terakhir yang diambil oleh CV Pandawa Ban untuk mengatasi keterlambatan ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena disatu sisi, yakni penyewa merasa sangat dirugikan. Ia harus membayar denda atas keterlambatannya dan kehilangan hak pakai atas objek sewa menyewa tersebut.

Bila memperhatikan pelaksanaan sewa menyewa mobil yang sebagian isi perjanjiannya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yaitu masalah kerusakan

¹² Almujaḥma, Al malik Fahd, *al-Quran dan terjemahan*, (Riyadh: Arab Saudi, 1998), h. 613

dan keterlambatan dalam mengembalikan mobil. Kemudian, apabila memperhatikan syarat dalam melaksanakan aktifitas *ijarah*, didalam melakukan akad tidak boleh ada unsur menipu, baik datang nya dari *mu'ajjir* (orang yang memberi *ijarah*), atau dari *musta'jir* (Orang yang membayar *ijarah*), sebab penipuan atau khianat merupakan sifat yang tercela dalam agama. Dan kedua belah pihak yang melakukan akad *ijarah* di tuntutan untuk memiliki pengetahuan yang memadai akan objek yang mereka jadikan sasaran dalam berijarah, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari ¹³

Banyak ayat atau riwayat yang berbicara tentang tidak boleh berbuat khianat atau menipu dalam berbagai lapangan kegiatan. Diantaranya ayat al-Qur'an surat al-Syu'ara ayat 183:

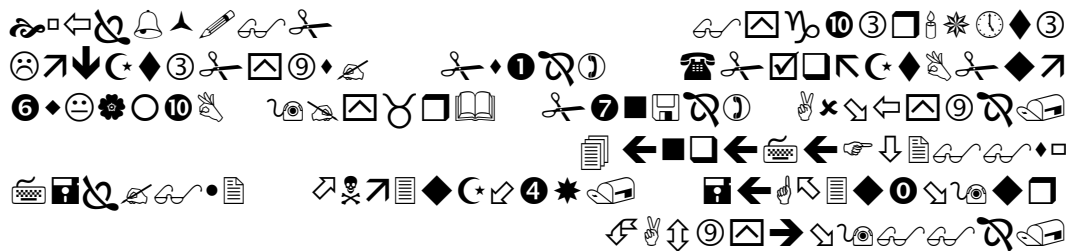


Artinya: “Janganlah kamu kurangkan hak manusia dan jangan pula berbuat bencana dimuka bumi.” ¹⁴

Dengan demikian di dalam melakukan sewa menyewa di larang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain Meskipun sewa menyewa di lakukan dengan tertulis dan secara lisan, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

¹³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993),h. 36

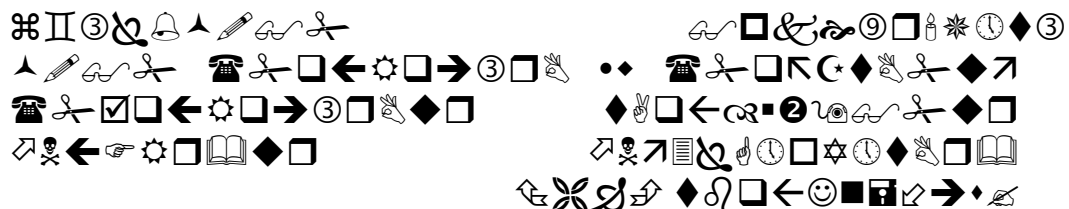
¹⁴ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: Hidakarya Agung, t.th.), h. 550



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”¹⁵

Sedangkan sewa menyewa di laksanakan dengan perjanjian saling percaya (dengan lisan), maka harus tetap dapat menjaga suatu amanah yang sudah diamanahkan oleh pihak pihak yang memberi sewa maupun penyewa, yang telah disepakati bersama. Karena amanah merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar bagi yang di berikan amanah, dan ia harus benar menjaga dan menjalankan amanah tersebut dengan baik dan tidak boleh menyalahgunakan amanah tersebut.

Dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:



Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati

Allah dan Rasul Muhammad) dan (juga) janganlah kamu

¹⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1998), h. 37.

mengkhianati amanat-amanat yang di percayai kepadamu, sedang kamu mengetahui.”¹⁶

Karena pada prinsipnya sewa menyewa di dalam Islam hukumnya mubah atau di bolehkan selagi dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam, di dalam kaidah fiqhiyah di jelaskan bahwa asal sesuatu itu boleh. Yang berbunyi:

الأصل في الأشياء إلا باحالة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “Hukum asal sesuatu itu adalah kebolehan, sehingga dapat bukti yang mengharamkannya.”¹⁷

Pendapat Jumhur Fuqaha bahwa sewa menyewa adalah akad yang mengikat (tetap), yang berlandaskan kepada Firman Allah SWT. Surat al-Maidah ayat 1:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”¹⁸

Walaupun sewa menyewa merupakan akad yang tetap dan mengikat, tetapi para fuqaha berselisih pendapat tentang perkara perkara yang dapat membatalkannya. Sekelompok fuqaha amshar (negeri- negeri besar), yakni Imam Malik, Syafi’i, Sufyan al Tsauri, Abu Tsaur dan lain-lain, berpendapat bahwa sewa menyewa tidak batal kecuali dengan adanya perkara perkara yang

¹⁶ *Ibid*, h. 143

¹⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), Cet. Ke-1, h. 119.

¹⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 84

membatalkan akad-akad yang tetap, misalnya karena ada cacat atau hilangnya tempat pengambilan manfaat.

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat tentang bolehnya membatalkan akad sewa menyewa karena adanya halangan yang datang secara tiba tiba pada si penyewa. Misalnya jika seseorang menyewa toko untuk berdagang kemudian dagangannya terbakar atau dicuri orang ¹⁹.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Syarat utama bagi pihak yang melakukan akad *ijarah* ialah berakal sehat dan mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk.

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan ketentuan yang dapat menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya maksud mulia yang diinginkan oleh agama.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas yang telah di paparkan, tentang wanprestasi pada penyewaan kendaraan bermotor roda empat pada CV. Pandawa Ban di Pekanbaru, ada beberapa di dalam sistem pelaksanaannya yang belum tercapai maksud yang baik yang diinginkan oleh Islam. Apabila di lihat dari beberapa penjelasan dari kedua pihak, penyewa bertentangan dengan konsep Islam, karena masih terdapat unsur keterlambatan dan kelalaian (wanprestasi) sewaktu perjanjian.sewa menyewa sedang

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV.Asy-syifa', 1990), Cet, 1, *jilid* 3, h.218

berjalan. Apabila pelaksanaan sewa menyewa ini sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya di perbolehkan, tetapi apabila sebaliknya di dalam pelaksanaan maupun akad perjanjian bertentangan dengan hukum Islam maka oleh Islam itu sangat di larang dan hukumnya haram.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari uraian di atas yang telah di paparkan oleh penulis dari hasil penelitian serta data data yang di peroleh, maka penulis menyimpulkan:

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa atau *ijarah* kendaraan bermotor antara CV. Pandawa Ban dengan penyewa diawali dengan pihak penyewa yang mendatangi pihak yang menyewakan kendaraan. Kemudian pihak penyewa memeriksa tentang mobil yang akan di sewanya, apakah baik dan layak jalan atau tidak. Setelah pihak penyewa menganggap bahwa kendaraan yang akan di sewanya tersebut telah layak jalan, maka pihak yang menyewakan memberikan harga sewa, setelah pihak penyewa setuju dengan harga tersebut, maka di buatlah suatu perjanjian sewa menyewa yang dalam hal ini adalah dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis (lisan). Bahwa perjanjian dilaksanakan terhitung sejak tanggal penyewaan mobil sampai dengan batas waktu yang sudah di tentukan oleh kedua belah pihak, dan pembayaran sewa kendaraan perharinya adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Wanprestasi pada penyewaan kendaraan bermotor roda empat pada CV. Pandawa Ban di Pekanbaru di sebabkan karena keterlambatan dalam pembayaran dan lalai dalam mengembalikan kendaraan bermotor selain itu, disebabkan juga kurangnya merawat dan memelihara kendaraan yang

disewanya, hal ini menyebabkan ketidakpuasan bagi pemilik kendaraan. Adapun wanprestasi dalam pelaksanaan sewa menyewa itu bahwa penyewa tidak memenuhi perjanjian sewa menyewa yang sudah disepakati. Apabila penyewa melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian, maka penyewa dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang sudah ia langgar berdasarkan dengan isi surat perjanjian.

3. Sewa menyewa dalam Islam merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang di bolehkan dan tidak di larang, apabila di dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sewa menyewa dapat di lakukan dan di perbolehkan apabila di dalam melakukan perjanjian tidak ada unsur penipuan atau kecurangan, sehingga praktek pelaksanaan sewa menyewa tersebut tidak sesuai dengan konsep Islam, karena prinsip dalam bermuamalah adalah suka sama suka atau rela sama rela antara satu dengan yang lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yang di lakukan, khususnya mengenai pembayaran uang sewa dan pengembalian kendaraan bermotor, hendaknya pihak yang menyewakan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak penyewa. Karena jika sistem tanpa sanksi yang di terapkan kepada pihak penyewa akan menyebabkan wanprestasi keterlambatan dari pihak penyewa dapat terulang lagi.

Hendaknya pihak yang menyewakan lebih tegas tentang sanksi atau tindakan yang dilakukan pihak penyewa, apabila pihak penyewa melakukan penyimpangan atau wanprestasi terhadap isi perjanjian

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : Citra Media, 2006), Cet. 1
- Ahmad Ahar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung : Al-Ma'arif, 1997), Cet.1
- Al Mujamma', Almalik, *Alqur'an dan Terjemahan* (Riyadh : Arab Saudi, 1998), Cet 1
- A.Safii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2000) Cet. Pertama
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992). Cet 1
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). Cet 1
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Alquran, 1984), Cet. 1
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), Cet. 2
- Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Abiditama, 2001), Cet. 1
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987). Cet 1
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), Cet 1
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002). Cet 1
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz 3* (Semarang: Asy Syifa, 1990) Cet. 1
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Cet. 1
- Mahmud Yunus, *Tafsir Al Qur'an Karim*, (Jakarta : Hidakarya Agung. T. Th), Cet.1

Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushilyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. 1

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet.1

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13* (Bandung: Al Ma'rif, 1987) Cet. 1

Subekti, *Aspek Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1992), Cet.1

Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), Cet.1

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah* (Jakatra: Zikrul Hakim, 2004), Cet. 2

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel I | : Jawaban responden tentang betuk perjanjian sewa menyewa..... | 39 |
| Tabel II | : Jawaban reponden terhadap prosedur penyewaan bermotor roda empat pada CV. Pandawa Ban..... | 41 |
| Tabel III | : Jawaban responden mengenai apakah ada atau tidaknya jaminan yang diberikan kepada penyewa | 42 |
| Tabel IV | : Jawaban responden tentang pengetahuan mengenai isi perjanjian..... | 44 |
| Tabel V | : Jawaban responden mengenai penyerahan mobil | 48 |
| Tabel VI | : Jawaban responden ada atau tidaknya hambatan yang ditemui untuk memenuhi angsurannya | 49 |
| Tabel VII | : Jawaban responden ada atau tidaknya dikenakan bunga atas keterlambatan | 50 |